

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan temuan-temuan penelitian sebagaimana dikemukakan pada Bab IV, maka berikut ini disajikan kesimpulan umum sebagai jawaban pertanyaan penelitian dan kesimpulan khusus yang terkait dengan tujuan penelitian.

##### 1. Kesimpulan Umum

- a. Perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang memengaruhi besar kecilnya sumber dan jumlah pendanaan pendidikan dan anggaran APBD yang diperlukan dalam penyelenggaraan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan PAUD dan SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang sebagian besar bersumber dari orang tua. Sedangkan sumber penyelenggaraan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang bersumber dari Pemerintah Daerah
- b. Penetapan kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum mengakomodasikan secara seimbang pemecahan masalah pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai implementasi otonomi di bidang pendidikan. Pemenuhan anggaran pendidikan dasar menjadi fokus proses

penetapan kebijakan dalam kerangka melaksanakan program wajib belajar Sembilan tahun di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Alokasi pendanaan penyelenggaraan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah sesuai plafon dan prioritas belanja APBD yang ditetapkan Kepala Daerah dan DPRD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, Sebagai implikasi keterbatasan sumber-sumber pendanaan pendidikan baik

- c. Realisasi pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional dan pemeliharaan terutama gaji guru. Sedangkan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana program PAUD, pendidikan dasar dan menengah masih relatif belum sesuai kebutuhan.
- d. Kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang telah meningkatkan kelancaran pelaksanaan program dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan pendanaan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dapat meningkatkan APK pendidikan dasar sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan APK program PAUD dan pendidikan menengah masih kurang dari 100 %.
- e. Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga difokuskan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs dan pada kegiatan program PAUD dan pendidikan menengah dengan anggaran pendidikan yang relatif besar.
- f. Pertanggungjawaban pendanaan program Dinas Pendidikan integral dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten

Semarang. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar menjadi fokus dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

## 2. Kesimpulan Khusus

- a. Keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan program dan anggaran menjadi hambatan dalam penyusunan anggaran pendidikan sesuai ketentuan pengelolaan APBD

- 1) Program PAUD

Sebagian besar PAUD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum memiliki Kepala Sekolah dan Tata Usaha, para guru TK/RA belum memiliki kemampuan mengakses informasi bantuan dana dan teknis pengajuan anggaran kepada Pemerintah Daerah

- 2) Pendidikan Dasar

Kepala SD/MI dan SMP/MI mendapatkan bimbingan teknis secara langsung oleh Dinas Pendidikan dalam proses perencanaan program dan penyusunan anggaran sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan wajib belajar. Sehingga sebagian besar SD/MI dan SMP/MTs dapat mengakses informasi dan mengajukan dukungan anggaran dari APBD

- 3) Pendidikan Menengah

Seluruh SMA/MA/SMK telah memiliki tenaga administrasi dan didukung teknologi informasi, namun karena keterbatasan pendanaan

APBD maka hanya relative sedikit yang menerima alokasi anggaran dari APBD

- b. Penetapan anggaran pendanaan pendidikan Program PAUD, pendidikan dasar dan menengah dialokasikan sesuai plafond dan prioritas APBD yang ditetapkan Kepala Daerah dan DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Kondisi ini mengakibatkan Dinas Pendidikan tidak dapat mengoptimalkan usulan anggaran Program PAUD, Pendidikan dasar dan menengah
  - 1) Program PAUD  
Anggaran program PAUD TK / RA yang bersumber dari APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang masih relative rendah dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan program
  - 2) Pendidikan Dasar  
Anggaran program pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang memenuhi sebagian besar kebutuhan pelaksanaan program SD/MI dan SMP/MI
  - 3) Pendidikan Menengah  
Anggaran program pendidikan menengah yang bersumber dari APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum sesuai dengan jumlah kebutuhan pelaksanaan program SMA/MA/SMK
- c. Implementasi kebijakan pendanaan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dikoordinasikan oleh

Dinas Pengelola Keuangan Daerah belum dapat dilaksanakan efektif akibat belum didukung sistem informasi keuangan dan SDM

1) Program PAUD

Proses realisasi pendanaan pendidikan Program PAUD dilakukan secara langsung oleh Kepala Sekolah dan atau guru TK/RA

2) Pendidikan Dasar

Proses realisasi pendanaan pendidikan Program pendidikan dasar dilakukan secara langsung oleh Kepala Sekolah dibantu guru dan Komite Sekolah

3) Pendidikan Menengah

Proses realisasi pendanaan pendidikan Program pendidikan menengah dilakukan oleh Kepala Sekolah dibantu tenaga administrasi dan Komite Sekolah

d. Realisasi pendanaan pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional dan pemeliharaan

1) Program PAUD

Realisasi pendanaan pendidikan program PAUD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang relative kecil untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan TK/RA

2) Pendidikan Dasar

Realisasi pendanaan pendidikan program pendidikan dasar di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

### 3) Pendidikan Menengah

Realisasi pendanaan pendidikan program pendidikan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMA/MA/SMK

e. Kebijakan pendanaan pendidikan meningkatkan kelancaran pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

#### 1) Program PAUD

Kebijakan pendanaan pendidikan program PAUD yang bersumber dari APBD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dukungannya relative kecil dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran TK/RA

#### 2) Pendidikan Dasar

Kebijakan pendanaan pendidikan dasar yang bersumber dari APBD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam program wajib belajar Sembilan tahun pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

3) Pendidikan Menengah

Kebijakan pendanaan pendidikan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran SMA/MA/SMK

f. Kebijakan pendanaan pendidikan meningkatkan APK program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

1) Program PAUD

Kebijakan pendanaan pendidikan belum dapat mewujudkan APK program PAUD TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang hingga 100 sesuai target Pemerintah

2) Pendidikan Dasar

Kebijakan pendanaan pendidikan dapat mewujudkan APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga sesuai target Pemerintah dan sedangkan di Kabupaten Semarang APK SD/MI sesuai target Pemerintah

3) Pendidikan Menengah

Kebijakan pendanaan pendidikan belum dapat mewujudkan APK program menengah SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang sesuai target Pemerintah

g. Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dilakukan oleh DPRD difokuskan pada program wajib belajar pendidikan dasar

1) Program PAUD

Pendanaan pendidikan program PAUD – TK/RA belum menjadi fokus dalam Pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, oleh karena belum menjadi pertimbangan daya dukung pelaksanaan wajib belajar

## 2) Pendidikan Dasar

Pendanaan pendidikan program pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menjadi fokus dalam Pengawasan kebijakan pelaksanaan wajib belajar yang dilakukan oleh DPRD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

## 3) Pendidikan Menengah

Pendanaan pendidikan program menengah belum secara keseluruhan menjadi fokus dalam Pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Program pendidikan yang didukung anggaran relative besar dan menjadi fokus untuk menampung lulusan pendidikan dasar.

h. Pengawasan administrasi pendanaan pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan Inspektorat belum mencakup seluruh satuan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

## 1) Program PAUD

Administrasi pendanaan pendidikan program PAUD tidak menjadi obyek pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, oleh Karena alokasi dana dari Pemerintah Daerah relative kecil

## 2) Pendidikan Dasar

Administrasi pendanaan pendidikan program pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menjadi obyek pemeriksaan keuangan pelaksanaan program wajib belajar yang dilakukan oleh Inspektorat di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

## 3) Pendidikan Menengah

Administrasi pendanaan pendidikan menengah sebagian menjadi obyek pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Program pendidikan yang didukung Pemerintah Daerah relative besar maka menjadi fokus pemeriksaan

- i. Pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah menjadi bagian pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Masyarakat belum diberi kesempatan untuk mengetahui permasalahan pendanaan dan kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

### 1) Program PAUD

Pendanaan pendidikan program PAUD belum mendapatkan respon dari DPRD dan masyarakat secara proporsional dalam pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

## 2) Pendidikan Dasar

Pendanaan pendidikan program dasar mendapatkan respon DPRD dan masyarakat dalam pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan program wajib belajar sembilan tahun di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

### 3) Pendidikan Menengah

Pendanaan pendidikan program menengah belum mendapatkan respon yang optimal dari DPRD dan masyarakat dalam pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

## **B. Implikasi**

Implikasi yang dimaksudkan merupakan fenomena yang tersimpul dibalik kesimpulan penelitian terutama berkaitan dengan dimensi-dimensi dalam kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut ini implikasi penelitian yang perlu diperhatikan.

1. Belum didukungnya SDM yang memiliki kompetensi perencanaan berakibat usulan program dan anggaran PAUD, pendidikan dasar dan menengah belum sistematis sesuai ketentuan pengelolaan APBD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

#### a. Program PAUD

Usulan program dan anggaran program PAUD belum *matching* dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan hal ini berakibat kurang terakomodasikannya usulan program PAUD

b. Pendidikan Dasar

Keterbatasan SDM SD/MI dan SMP/MTs didukung dengan pendampingan Dinas Pendidikan dalam penyusunan program dan anggaran. Hal ini berimplikasi program dan anggaran pendidikan dasar sebagian besar terakomodasi dalam rencana kerja dan anggaran SKPD Dinas Pendidikan

c. Pendidikan Menengah

Dukungan SDM di SMA/MA/SMK tidak dapat mengoptimalkan program dan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran SKPD Dinas Pendidikan akibat keterbatasan plafon anggaran

2. Tidak seimbang alokasi anggaran pendidikan sesuai plafon Dan prioritas APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang mengakibatkan perbedaan kinerja pencapaian target program PAUD, pendidikan dasar dan menengah

a. Program PAUD

Sebagian besar anggaran pendidikan program PAUD bersumber dari orang tua (masyarakat) hal ini berimplikasi pengembangan TK/RA belum konsisten dengan kebijakan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar

Terpenuhi sebagian besar anggaran pendidikan dasar hal ini berimplikasi pengembangan SD/MI dan SMP/MTs konsisten dengan

kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah

Terpenuhi sebagian kecil anggaran pendidikan menengah hal ini berimplikasi pengembangan SMA/MA/SMK belum konsisten dengan perkembangan pendidikan dasar di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

3. Belum adanya SDM pada satuan pendidikan yang memiliki ketrampilan penatausahaan keuangan dan belum tersedianya sistem informasi keuangan *on line* mengakibatkan intensitas penatausahaan administrasi program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang tidak optimal

a. Program PAUD

Keterbatasan SDM TK/RA berakibat guru TK/RA melaksanakan peran ganda sebagai tenaga administrasi dalam penatausahaan pendanaan pendidikan. Hal ini membawa implikasi, kurang optimalnya penatausahaan keuangan program PAUD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar

Dukungan Komite Sekolah, Guru kepada Kepala Sekolah SD/MI dalam realisasi pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang membawa implikasi penatausahaan keuangan relative sesuai ketentuan yang berlaku

c. Pendidikan Menengah

Dukungan Tata usaha, Komite Sekolah, Guru kepada Kepala Sekolah SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dalam realisasi pendanaan pendidikan membawa implikasi penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

4. Proporsi belanja operasional dan pemeliharaan yang lebih besar dari belanja modal pendanaan pendidikan membawa implikasi keterbatasan sarana prasarana pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

a. Program PAUD

Rendahnya alokasi belanja modal pendidikan program PAUD berimplikasi keterbatasan pengembangan sarana prasarana bermain dan kreativitas pendidikan TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar

Rendahnya alokasi belanja modal pendidikan program pendidikan dasar berimplikasi keterbatasan pengembangan sarana prasarana program wajib belajar sembilan tahun SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah

Rendahnya alokasi belanja modal pendidikan program pendidikan menengah berimplikasi keterbatasan pengembangan sarana prasarana

program pendidikan SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

5. Perbedaan alokasi anggaran membawa implikasi perbedaan kelancaran pelaksanaan pendidikan dasar dengan program PAUD, dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

- a. Program PAUD

Masih rendahnya kontribusi pendanaan pendidikan dari APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang program PAUD berimplikasi perbedaan perkembangan pendidikan TK/RA dibandingkan dengan program pendidikan dasar dan menengah

- b. Pendidikan Dasar

Dukungan penuh kebijakan pendanaan pendidikan dasar berimplikasi perkembangan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang yang memerlukan kebijakan pengembangan program PAUD sebagai input SD/MI dan Pendidikan menengah sebagai kelanjutan pendidikan SMP/MTs

- c. Pendidikan Menengah

Belum optimalnya kebijakan pendanaan pendidikan terhadap kelancaran pendidikan menengah membawa implikasi perkembangan program pendidikan lanjutan SMA/MA/SMK tidak konsisten dengan perkembangan pendidikan dasar di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

6. Peningkatan APK program PAUD, dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum sesuai target pemerintah mengakibatkan perbedaan arah pengembangan pendidikan dasar

a. Program PAUD

Masih rendahnya APK program PAUD berimplikasi input siswa SD/MI di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang berasal dari pendidikan informal (rumah tangga). Pengembangan sarana prasarana pendidikan terutama pembangunan TK/RA diperlukan untuk meningkatkan pemerataan seluruh wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar

Tercapainya APK pendidikan dasar hingga 100 % sesuai target nasional, membawa implikasi Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Sragen mengembangkan program peningkatan mutu SD/MI dan SMP/MTs.

c. Pendidikan Menengah

Belum tercapai target APK program pendidikan menengah berimplikasi peningkatan program peningkatan akses dan pemerataan SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

7. Keterbatasan cakupan pengawasan DPRD terhadap kebijakan pendanaan pendidikan membawa implikasi perbedaan kinerja satuan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

a. Program PAUD

Belum terakomodasikannya program PAUD dalam pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan berimplikasi pengawasan DPRD belum dapat menjelaskan kinerja TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar

Terakomodasikannya seluruh program pendidikan dasar dalam pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan berimplikasi kinerja SD/MI dan SMP/MTs dapat dijelaskan sesuai kondisi manajemen satuan pendidikan yang bersangkutan

c. Pendidikan Menengah

Terakomodasikannya sebagian program pendidikan dalam pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan berimplikasi kinerja SMA/MA/SMK belum merepresentasikan kondisi manajemen satuan pendidikan yang bersangkutan

8. Keterbatasan pelaksanaan obyek pemeriksaan pendanaan pendidikan oleh Inspektorat membawa implikasi perbedaan kinerja administrasi satuan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

a. Program PAUD

Belum terakomodasikannya program PAUD dalam pemeriksaan keuangan berimplikasi kinerja administrasi keuangan TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum dapat dijelaskan secara menyeluruh

b. Pendidikan Dasar

Terakomodasikannya seluruh program pendidikan dasar dalam pemeriksaan keuangan berimplikasi kinerja administrasi keuangan SD/MI dan SMP/MTs dapat dijelaskan dan konsisten dengan target Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah

Terakomodasikannya sebagian program dalam pemeriksaan keuangan berimplikasi kinerja administrasi keuangan berimplikasi kinerja SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dan belum dapat digambarkan secara menyeluruh sesuai norma manajemen satuan pendidikan yang bersangkutan

9. Belum terakomodasikannya partisipasi publik dalam pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan membawa implikasi perbedaan persepsi masyarakat terhadap kinerja program pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

a. Program PAUD

Belum terakomodasikannya program PAUD secara intergral dalam pertanggungjawaban pendanaan pendidikan berimplikasi belum optimalnya persepsi masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan program TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar

Terakomodasikannya seluruh program pendidikan dasar secara intergral dalam pertanggungjawaban pendanaan pendidikan

berimplikasi meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja SD/MI dan SMP/MTs Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah

Terakomodasikannya sebagian program pendidikan menengah secara integral dalam pertanggungjawaban pendanaan pendidikan berimplikasi belum optimalnya persepsi masyarakat terhadap kinerja SMA/MA/SMK Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

### C. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan kesimpulan dan implikasi penelitian, dapat disampaikan rekomendasi kepada berbagai pihak-pihak terkait di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan konsistensi program dan usulan anggaran satuan pendidikan perlu dilakukan pengisian jabatan pada satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peningkatan kompetensi

Kepala Sekolah dan Tata Usaha

a. Program PAUD

Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan setiap TK/RA untuk menetapkan Kepala Sekolah sesuai kualifikasi jabatan dan criteria yang ditetapkan pada SNP dan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan administrasi program, anggaran dan penatausahaan keuangan

b. Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan setiap SD/MI untuk menetapkan tenaga administrasi sesuai kualifikasi jabatan dan criteria yang ditetapkan pada SNP dan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan administrasi program, anggaran dan penatausahaan keuangan

c. Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan administrasi program, anggaran dan penatausahaan keuangan

2. Untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang perlu keseimbangan proporsi anggaran pendidikan sesuai plafond dan prioritas APBD

a. Program PAUD

Perlu peningkatan alokasi tambahan anggaran pendidikan dari APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang agar semakin seimbang dengan kontribusi orang tua siswa TK/RA.

b. Pendidikan Dasar

Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan agar semakin seimbang dengan alokasi APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah

Perlu peningkatan alokasi tambahan anggaran pendidikan agar dari APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang semakin berimbang dengan kontribusi orang tua siswa SMA/MA/SMK

3. Untuk meningkatkan intensitas realisasi pendanaan pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang perlu tambahan jumlah personil dan penerapan sistem informasi keuangan on line
  - a. Program PAUD  
Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan sistem informasi keuangan kepada Kepala TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
  - b. Pendidikan dasar  
Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan sistem informasi keuangan kepada Kepala SD/MI dan SMP/MTs dan tenaga administrasi yang secara khusus mengelola keuangan dan administrasi
  - c. Pendidikan Menengah  
Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan sistem informasi keuangan kepada Kepala Sekolah dan atau wakil serta dan tenaga administrasi yang secara khusus mengelola keuangan dan administrasi adminisrasi keuangan SMA/MA/SMK
4. Untuk meningkatkan eksistensi dan keberlanjutan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten

Semarang perlu keseimbangan proporsi belanja operasi dan pemeliharaan dengan belanja modal.

a. Program PAUD

Alokasi belanja modal difokuskan untuk pembangunan sekolah (unit gedung baru) pembangunan TK/RA baik secara terpisah maupun menjadi satu atap pada SD/MI

b. Pendidikan dasar

Alokasi belanja modal difokuskan untuk peningkatan mutu SD/MI dan SMP/MI dengan pembangunan perpustakaan, dan laboratorium.

c. Pendidikan Menengah

Alokasi belanja modal difokuskan untuk penambahan sarana prasarana perpustakaan, laboratorium SMA dan MA serta bengkel bagi SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

5. Untuk meningkatkan pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang perlu dukungan dana yang relevan dengan peningkatan APK dan APM

a. Program PAUD

Dukungan beasiswa bagi keluarga miskin agar dapat mengikuti program pendidikan TK/RA

b. Pendidikan Dasar

Dukungan beasiswa bagi keluarga miskin dan siswa putus sekolah agar dapat mengikuti program pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

c. Pendidikan Menengah

Dukungan beasiswa bagi keluarga miskin dan siswa putus sekolah agar dapat mengikuti program pendidikan SMA/MA/SMK

6. Untuk meningkatkan kinerja program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang perlu kebijakan pengawasan seluruh program pendanaan pendidikan

a. Program PAUD

Pengawasan keuangan PAUD meliputi sumber masyarakat dan APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar

Pengawasan keuangan pendidikan meliputi BOS, DAK dan beasiswa retrieval bagi siswa putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs dari Pemda Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah

Pengawasan keuangan pendidikan SMA/MA/SMK meliputi sumber dari masyarakat dari Pemerintah (BOMM, DAK), Provinsi beasiswa retrieval bagi siswa putus sekolah dari APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

7. Untuk meningkatkan kinerja administrasi keuangan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang perlu pemeriksaan seluruh program pendidikan
  - a. Program PAUD

Mencakup buku kas dan inventaris TK/RA
  - b. Pendidikan dasar

Mencakup buku kas, bank dan inventaris serta mutasi kekayaan SD/MI dan SMP/MTs
  - c. Pendidikan Menengah

Mencakup buku kas, bank dan inventaris serta mutasi kekayaan SMA/MA/SMK
8. Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuangan perlu rekrut tenaga ahli di lingkungan DPRD dan tambahan tenaga auditor di Inspektorat di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
9. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja program PAUD, pendidikan dasar dan menengah, dalam pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang menetapkan regulasi partisipasi publik